

ABSTRAK

Tindak Pidana Pemalsuan Surat merupakan kejahatan yang diatur dalam KUH Pidana diantaranya diatur dalam Pasal 263 KUH Pidana dan Pasal 264 KUH Pidana. Perkara yang penulis teliti ini adalah mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik terhadap akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana. Terdapat dua laporan polisi atas perkara ini yakni yang pertama adalah laporan atas nama pelapor Sdr. B. Albertus Sihite mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan atau tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dan atau Pasal 372 KUH Pidana dengan terlapor Sdr. Pantur Banjarnahor, dan yang kedua adalah laporan dengan pelapor Sdr. Pantur Banjarnahor mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 atau Pasal 264 ayat 2 dan atau Pasal 311 KUH Pidana dengan terlapor Sdr. B. Albertus Sihite. Permasalahannya adalah dua orang pendiri dari Koperasi Wahana Mitra Kencana saling menuduh telah melakukan pemalsuan akta otentik dan pihak penyidik belum dapat memutuskan laporan mana yang dapat dilanjutkan dan pihak yang mana lebih meyakinkan untuk dapat diduga melakukan tindak pidana pemalsuan akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana. maka dari itu perlu dianalisis lebih lanjut pemenuhan unsur tindak pidana pemalsuan akta otentik yang diduga dilakukan oleh dua orang pendiri Koperasi Wahana Mitra Kencana.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian dengan pendekatan case study. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada kasus dugaan tindak pidana pemalsuan akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana. Data untuk meneliti studi kasus ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang hanya berlaku pada kasus yang diselidiki.

Akhir penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pemenuhan Pasal 264 KUH Pidana terhadap perbuatan Sdr. B. Albertus Sihite diduga memenuhi unsur-unsur pada Pasal 264 KUH Pidana, sehingga apabila bukti-buktinya cukup dan terpenuhi maka Sdr. B. Albertus Sihite dapat dituntut dengan Pasal ini. Sementara terhadap Sdr. Pantur Banjarnahor Pasal 264 KUH Pidana ini tidak dapat diterapkan padanya karena perbuatannya diduga tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 264 KUH Pidana. Pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini adalah Sdr. Budy Syafrudin sebagai penggagas dibentuknya Koperasi Wahana Mitra Kencana, Dengan hasil penelaahan tersebut, pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini adalah Sdr. Budy Syafrudin dan dapat mengambil langkah hukum dengan membuat laopran polisi atas kasus ini.

ABSTRACT

Counterfeit Crime Letters are crimes regulated in the Criminal Code including those regulated in Article 263 of the Criminal Code and Article 264 of the Criminal Code. The case of this research is about the alleged crime of falsifying authentic deed against the deed of establishment of the Wahana Mitra Kencana Cooperative. There are two police reports on this case, the first being a report on behalf of the reporter B. Albertus Sihite regarding the alleged criminal act of forgery of authentic deed and / or embezzlement as referred to in Article 266 and or Article 372 of the Criminal Code with the reported person is Pantur Banjarnahor, and the second is a police report with the reporter Pantur Banjarnahor regarding the alleged criminal act of falsifying the deed of establishment of the Wahana Mitra Kencana Cooperative as referred to in Article 263 paragraph 2 or Article 264 paragraph 2 and or Article 311 of the Criminal Code with the reported person is B. Albertus Sihite. The problem is that two founders of the Wahana Mitra Kencana Cooperative accused each other of falsifying an authentic deed and the investigator had not been able to decide which report could proceed and which party was more convincing to be able to be suspected of falsifying the deed of establishment of the Wahana Mitra Kencana Cooperative. Therefore it is necessary to further analyze the fulfillment of the element of criminal acts of forgery of authentic deeds allegedly carried out by two founders of the Wahana Mitra Kencana Cooperative.

The research method used in the writing of this final project is a descriptive qualitative research method which is a study with a case study approach. This study focused intensively on the alleged crime of falsifying the deed of establishment of the Wahana Mitra Kencana Cooperative. Data for researching this case study were collected from various sources that only apply to the case investigated.

The end of the study concluded that the fulfillment of Article 264 of the Criminal Code against action of B. Albertus Sihite allegedly fulfilled the elements in Article 264 of the Criminal Code, so that if the evidence is sufficient and fulfilled, B. Albertus Sihite can be prosecuted under this Article. Whereas for Pantur Banjarnahor, Article 264 of the Criminal Code cannot be applied to him because his actions are allegedly not fulfilling the elements of Article 264 of the Criminal Code. The most disadvantaged party in this case is Budy Syafrudin as the initiator of the establishment of the Wahana Mitra Kencana Cooperative. With the results of the review, the party most disadvantaged in this case is Budy Syafrudin and can take legal steps by making police oversight of this case.